PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT TUANKU TAMBUSAI PEKANBARU

Oleh : Syafrianto

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., M.H

Pembimbing II : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Alamat: Jalan Taskurun Nomor 37, Pekanbaru- Riau

Email: rianboenksu@gmail.com

ABSTRACT

Micro Business Loan (KUR) Micro is a credit or working capital financing aimed at business actors who do not have additional collateral, but in the implementation the dealer still requested additional collateral to the prospective customer.

The purpose of writing this thesis, namely: first, to know the implementation process of Micro Business Loans (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru. Second, knowing the reason of PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru requested additional collateral to prospective customers in Micro Small Business Credit (KUR) process. The type of this research is sociological research, that is research obtained directly from society.

From the results of the study there are several things that can be concluded that the reason for requesting additional collateral to prospective customers is to guarantee and provide a sense of security to the bank against the funds it provides and to ensure that the debtor has the intention and good faith to fulfill his achievements because his securities serve as additional collateral. The author's suggestion, the dealer to further improve the quality of service and remove additional collateral requests so as to provide a legal certainty for the community.

Keyword: Implementation - Micro KUR - Additional Collateral

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak secara langsung terhadap kemajuan suatu bangsa. Untuk mendukung kemajuan dan perkembangan usahanya, maka para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut akan melakukan kontak atau berhubungan dengan pihak bank untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta, maupun perorangan menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.¹ Maka dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pihak perbankan dalam hal ini memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk kredit.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit dalam bentuk bantuan modal kerja dengan plafon maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah melakukan kegiatan usahanya minimal selama 6 (enam) bulan, dan tidak memiliki pinjaman kredit pembiayaan lain kecuali kredit konsumtif.²

Tabel 1.1

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru

No	Tahun Penyaluran	Jumlah Penerima
1	2013	298 orang
2	2014	360 orang
3	2015	(Program KUR ditutup)

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.7.

²Wawancara langsung dengan Bapak Hardi Kepala Unit dan Bapak Ikhsan, Marketing bidang KUR Bank Rakyat Indonesia(BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru, bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru.

		sementara)
4	2016	609 orang
Jumlah		1267 orang

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru, Tahun 2017.

Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini terindikasi memiliki suatu kejangggalan yang melanggar amanat pencetus program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut. Kejangggalan tersebut ialah dalam setiap pelaksanaannya pihak bank (penyalur) memasukkan agunan tambahan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal ini jelas-jelas melanggar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa agunan tambahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru?
2. Mengapa PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru meminta agunan tambahan kepada calon nasabah dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui alasan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru meminta agunan tambahan kepada calon nasabah dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata bisnis pada khususnya.
- b. Memberi wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta kebijakan mengenai agunan tambahan dalam proses penyaluran tersebut.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam topik yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adapun aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun

keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁵

2. Konsep Pemberian Kredit

Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presiden yang ditunjukkan kepada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan "akad perjanjian kredit" (Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan, Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10, Tanggal 13 Oktober 1996 dan Surat Edaran Bank Indonesia Unit 1 Nomor 2/53/UPK/Pemb, Tanggal 8 Oktober 1996 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb, Tanggal 20 Oktober 1996).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pencantuman kata persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam dalam pengertian kredit diatas dimaksudkan untuk :⁶

- a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian dalam hubungan kredit bank berlaku ketentuan dalam buku ketiga tentang perikatan pada umumnya dan Bab XIII (tentang perjanjian pinjam-meminjam) KUHPperdata khususnya.
- b. Mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk tertulis.

3. Teori Hukum Murni

Teori hukum murni adalah suatu teori besar dan kesohor dalam ilmu hukum, yang berusaha menelaah ilmu hukum dari dalam ilmu hukum itu

⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

⁶Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.180.

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

sendiri dan dengan memakai metode ilmu hukum itu sendiri, dengan menghilangkan pengaruh dari ilmu lain dalam menganalisis hukum, seperti menghilangkan pengaruh dari ilmu etika, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu sejarah.⁷

Fokus utama teori hukum murni menurut Hans Kelsen bukanlah salinan ide transdental yang sedikit banyak tidak sempurna. Teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, sebagai anak dari orang tua yang suci. Teori hukum tampaknya memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transdental dengan meniadakan keadilan transdental dari perhatian spesifiknya.

Teori ini tidak melihat manifestasi dari suatu otorita gaib didalam hukum, melainkan meninjau suatu teknik sosial spesifik yang didasarkan pada pengalaman manusia. Teori hukum murni menolak untuk dijadikan ilmu metafisika hukum. Pada dasarnya tidak ada perbedaan esensial antara ilmu hukum analitik dan teori hukum murni, namun yang membedakan keduanya adalah karena teori hukum murni berusaha untuk melanjutkan metode hukum analitik dengan lebih konsisten dari yang diupayakan Austin dan para pengikutnya.

Teori hukum murni ini hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Hans Kelsen teori hukum murni adalah teori hukum positif. Ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab pertanyaan “apakah hukumnya?” dan bukan “bagaimanakah hukum yang seharusnya?”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer.⁸ Penelitian jenis ini bertujuan untuk melihat kesinambungan antara hukum dan kegiatan masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru yang

beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Nomor 122 AB, Kel. Kampung Melayu Kota Pekanbaru, Riau. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai terdapat fasilitas pelayanan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang lokasinya cukup strategis karena berdekatan dengan pasar tradisional dan pusat keramaian yang memiliki banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan sasaran utama dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru;
- 2) Marketing Bidang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru;
- 3) Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagiandari populasi.¹⁰ Untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka penulis menentukan sampel. Dimana sampel adalah objek penelitian yang dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang digunakan adalah *purposive*. Metode ini merupakan metode yang menetapkan beberapa atau sejumlah sampel yang dapat mewakili jumlah populasi yang ada, dimana dalam hal ini kategori sampelnya itu telah ditetapkan oleh penulis sendiri.

4. Sumber Data

⁷Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2013, hlm.127.

⁸Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan, 2013, hlm.25.

⁹Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.118.

¹⁰Ibid, hlm.119.

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer terdiri dari:

- a. Data primer merupakan data yang telah dikumpulkan sendiri oleh penulis dilapangan melalui wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder yaitu data yang penulis dapat dari bahan-bahan bacaan yang bersifat mendukung data primer. Seperti buku literatur, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otorita yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara langsung kepada responden yang berupa tanya jawab secara lisan. Dalam teknik ini penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktural guna mempermudah komunikasi dengan responden.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan, yaitu dengan cara mencari literatur yang berkaitan dengan penelitian.¹¹

6. alisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasan secara umum terhadap permasalahan dan penyelesaiannya terhadap masalah yang diajukan secara sistematis dan menyeluruh.¹²

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbul keresahan. Antara hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun hubungan

¹¹Meriza Elpha Darnia, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) di Pasar Tradisional Panam Pekanbaru", *Jurnal Dinamika dan Problema Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, Nomor.1, Desember 2013, hlm.88.

¹²Taufiqul Hualam dan Syaifuddin Anshari, "Perjanjian Mudharabah: Studi Pada PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Republica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. IIX, Nomor. 2, Mei 2009.

¹³Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

dengan masyarakat.¹⁴ Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

2. Kepastian Hukum pada Negara Eropa Kontinental

Di negara penganut Eropa Kontinental, seperti Indonesia dikenal istilah kepastian hukum. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dalam peraturan tertulis, misalnya Undang-Undang. Dalam menjaga kepastian hukum, peran penting pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksana yang diatur oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan yang demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan tersebut harus dipulihkan seperti sedia kala.¹⁵

3. Kepastian Hukum pada Negara *Common Law System*

Bagi negara *Common Law System*, yurisprudensi memang merupakan sumber hukum terpenting, *Judge made law* mengambil tempat terpenting disamping *statue law* (hukum undang-undang). Putusan hakim berdasarkan asas *preseden* ini kekuatan yang mengikat. Kewajiban semacam itu tidak dikenal di negara-negara penganut *civil law system*. Namun demikian, bukan berarti di negara-negara *civil law* tersebut tidak dikenal adanya *preseden*. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan *preseden*. Hanya saja digunakannya *preseden* tersebut bukan merupakan kewajiban.¹⁶

4. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Berbicara mengenai kepastian hukum, ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Lawrence M.

Friedmen, bahwa dalam kepastian hukum ada 3 (tiga) hal yang harus dibicarakan yaitu:¹⁷

- a. Substansi hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang.
- b. Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat. Mengenai struktur hukum yang dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Jadi struktur hukum itu merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang memungkinkan terlaksananya pelayanan dan penegakan hukum.
- c. Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang dan respon-respon dari masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum tersebut.

5. Kepastian Hukum dan Keadilan

Menurut Redbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif harus selalu ditaati, bahkan jika isinya dianggap kurang adil, atau isinya kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat pengecualian yakni jika bertentangan dengan isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu harus dilepaskan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan, dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan, artinya pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah

¹⁴Muhammad Rido I, Penerapan Pidana Adat dan Pidana dalam KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan dengan Peran Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Adat Persukuan Domo Air Tiris dan Kepolisian Resor Kampar), *Skripsi*, Program Kekhususan Pidana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.39.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2010, hlm.52.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Muhammad Rido I, Penerapan Pidana Adat dan Pidana dalam KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan dengan Peran Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Adat Persukuan Domo Air Tiris dan Kepolisian Resor Kampar), *Skripsi*, Program Kekhususan Pidana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.45.

¹⁸Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.54.

diperjanjikan.¹⁹ Berdasarkan aturan hukum yang berlaku mengenai bunga dalam kredit diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berbunyi Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁰

2. Tujuan Kredit

Tujuan kredit dapat dilihat dari sudut pemberi dan penerima kredit, yaitu:²¹

- a. Tujuan pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) yang tinggi dari jasa pemberian kredit dan keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah menyimpan. Kredit yang aman akan memberikan dampak yang positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah. Dengan demikian *profitability* dan *safety* akan berjalan beriringan.
- b. Tujuan penerima kredit adalah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang, barang, jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktu sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang diperoleh debitur dapat berupa barang atau jasa dan pengembalian atas penggantinya dapat berupa barang atau jasa. Dengan nilai pengembalian yang lebih tinggi dari nilai yang diterima semula karena benda tersebut telah mengalami perjalanan waktu yang perlu diberi harga.

3. Fungsi Kredit

Secara garis besar fungsi dari kredit adalah untuk meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang, meningkatkan daya guna (*ability*) dari barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, salah satu alat stabilisasi ekonomi, menimbulkan gairah usaha dari masyarakat, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.²²

¹⁹R.Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm.14.

²⁰Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²¹Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, EKONISIA, Yogyakarta, 2002, hlm.20.

²²*Ibid*, hlm.21.

4. Manajemen Perkreditan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamanan kredit, kebijaksanaan yang ditempuh bank sangat sangat berkaitan erat dengan *line of bussiness* bank tersebut, bentuk dan sifat kredit yang dapat diberikan, pengaturan rencana kredit, pengaturan wewenang kredit, analisis kredit, penetapan plafond kredit, pengaturan administrasi kredit, pembinaan kredit dan yang terkhir adalah pengamanan atas kredit yang berjalan.

5. Konsep Penilaian Kredit

Penilaian kredit merupakan proses atau kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur. Penilaian kredit atau disebut juga analisis kredit sangat mempengaruhi kualitas fortopolio kredit bank. Analisis kredit yang kurang akurat pada akhirnya akan menyebabkan terjadi kredit bermasalah.²³ Sebelum pemberian kredit, pihak bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah berdasarkan pada formula *the five of credit analisys* yang disebut juga "5C's" yaitu:²⁴

- a. *Character* (penilaian watak), yaitu untuk mengetahui apakah debitur mempunyai kemauan untuk membayar utangnya.
- b. *Capacity* (penilaian kemampuan), yaitu perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yang menyangkut kinerjanya dalam perusahaan.
- c. *Capital* (penilaian modal), yaitu mengenai besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debitur merupakan perusahaan dan

²³*Ibid*, hlm.57.

²⁴Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.57.

segi pendapatan apabila debitur merupakan perseorangan.

- d. *Collateral* (penilaian agunan), yaitu kemampuan calon debitur memberikan agunan yang baik secara hukum maupun secara ekonomi.
- e. *Condition of economy* (penilaian prospek usaha debitur), yaitu dari segi ekonomi debitur, bank harus juga menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran hasil proyek atau usaha dari debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Hal ini karena bank harus mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

6. Perjanjian Kredit

Istilah mengenai perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*, dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama (*unbenoemde contracten*) karena tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya. Dasar hukum dari perjanjian kredit ini berlandaskan kepada kesepakatan atau persetujuan antara bank dan calon debiturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.²⁵

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahulu (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian utang-piutang, sedangkan perjanjian utang-piutang merupakan pelaksana dari perjanjian pendahulu atau perjanjian kredit. Kiranya uraian ini cukup jelas jika arti pendahulu pada perjanjian kredit dibedakan dengan arti pelaksanaan perjanjian utang-piutang.²⁶

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok maka perlu mendapat perhatian yang lebih serius baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur. Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu:²⁷

- a. Perjanjian atau pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan.

- b. Perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (notaril) atau akta otentik.

C. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

2. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pasal 12 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat mengatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh penyalur terdiri atas:

- a) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- b) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel;
- c) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

²⁵Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.262-263.

²⁶Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm.29.

²⁷*Ibid*, hlm.31.

3. Kredit Mikro

Menurut Mauguiret Robinson, pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*).²⁸

Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perseorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 per tahun.²⁹

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru

1. Pelaksanaan Pemberian KUR Mikro

Pelaksanaan pemberian atau penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Setiap pemberian kredit, pihak bank harus membuat kebijakan pemberian kredit yang sehat. Hal ini bertujuan agar menciptakan keamanan dan meminimalisir risiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Menurut Kasmir, kebijakan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang hendak diberikan oleh bank kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan.³⁰

²⁸Wiloejo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, hlm.89.

²⁹<http://pse.litbang.deptan.go.id>, diakses pada 26 Oktober 2017 pukul 01.38 WIB.

³⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.115.

Salah satu persyaratan dalam perjanjian kredit adalah adanya kesepakatan atau komitmen kedua belah pihak. Komitmen berarti berkenaan dengan pemberi pinjaman, kewajiban pemberi pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, dan yang tidak boleh melebihi jumlah pokok yang disebutkan dibalik nama Pemberi pinjaman tersebut pada jadwal dibawah judul komitmen.³¹

Secara umum pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada seluruh bank BRI yang tersebar diseluruh Indonesia relatif sama, termasuk pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit BRI Unit Tuanku Tambusai (Bapak Hardi), dapat dikemukakan bahwa proses pelaksanaan pemberian KUR Mikro dilakukan secara bertahap yaitu :

- a) Tahap permohonan Kredit, yaitu calon debitur mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak penyalur KUR Mikro, dalam hal ini BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru
- b) Tahap analisis Kredit, yaitu pihak penyalur menganalisa permohonan yang diajukan calon debitur serta memeriksa kelengkapan persyaratan dan kelayakan calon debitur
- c) Tahap pemberian putusan Kredit, yaitu keputusan mengenai persetujuan terhadap permohonan yang diajukan calon debitur yang dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur
- d) Tahap pencairan Kredit atau akad Kredit, yaitu berupa persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, flat bayar, serta menyangkut pembayaran pencairan KUR tersebut.

Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru dimulai pada tahap permohonan kredit.³² Permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku, dimana formulir perjanjian sudah disediakan oleh pihak bank,

³¹<http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,>
Superpriority Debtor In Possession Credit Agreement, James River Coal Company.

³²Wawancara dengan Bapak Hardi, Kepala Unit BRI Unit Tuanku Tambusai, 30 Oktober 2017, bertempat di BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru.

sehingga calon nasabah hanya tinggal mengisi formulir tersebut dan dibantu oleh *customer servis* untuk mengarahkan calon nasabah dalam mengisi formulir dengan benar. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran klausula baku, tidak lain karena dicantumkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut.³³

Dalam permohonan kredit tersebut calon nasabah atau debitur harus membawa dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Persyaratan yang dimaksud adalah:³⁴

- a) Individu atau perorangan yang menjalankan usaha produktif dan layak;
- b) Usaha telah berjalan aktif minimal 6 (enam) bulan;
- c) Tidak dalam situasi menerima produk kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu Kredit;
- d) Surat izin tempat usaha;
- e) Foto copy KTP;
- f) Foto copy Kartu Keluarga;
- g) Foto copy buku nikah (bagi yang sudah berkeluarga);
- h) Pas photo;
- i) Usia minimal 21 tahun dan atau sudah menikah (cakap hukum);
- j) Besaran kredit yang diberikan maksimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- k) Jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun untuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan maksimal 5 (lima) tahun untuk Kredit Investasi (KI).

Setelah semua syarat dan proses tersebut dilalui, maka nasabah akan menunggu hasil penilaian dari pihak bank tentang kelayakan calon nasabah dalam menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Lembaga kreditur diminta untuk memasukkan dalam tanggal sertifikasi tindakan yang diambil untuk mematuhi 4 C.F.R. § 102.3 adalah untuk memastikan bahwa debitur memiliki pemberitahuan tentang maksud untuk mengimbangi dan bahwa dia diberi kesempatan untuk meresponsnya.³⁵ Jadi lamanya proses ini

tergantung dari banyaknya aplikasi yang masuk dan menunggu antrian dari calon nasabah lain.

Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini memang sudah cukup baik dan hampir sesuai dengan semua amanat peraturan perundang-undangan, namun terdapat suatu hal yang membuat pelaksanaan ini bertentangan dengan aturan yaitu adanya syarat yang mewajibkan pihak nasabah untuk memberikan agunan tambahan kepada pihak penyalur.

Dimintanya agunan tambahan oleh pihak penyalur ini membuat pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini bertentangan dengan aturan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa Perikatan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian KUR Mikro

Dalam pelaksanaan pemberian KUR mikro ini tentu terdapat kendala-kendala yang terjadi baik dalam proses pra-pemberian kredit hingga pasca-pemberian kredit. Dari penelitian di lapangan dan hasil wawancara, penulis menemukan beberapa kendala dan membaginya kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Kendala yang dihadapi Penyalur (BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru):³⁶
 - 1) Usaha kurang produktif, yaitu dalam melakukan persetujuan KUR pihak Bank akan melakukan verifikasi data dan survey terhadap usaha yang menjadi objek. Sering kali berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak bank tersebut ditemukan usaha calon penerima KUR tersebut kurang layak dan kurang prospektif sehingga menjadi faktor yang membuat pihak bank enggan memberikan KUR Mikro tersebut kepada calon penerima.

³³Riska Fitriani, "Praktik Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kota Pekanbaru", *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, Nomor.1, Desember 2013, hlm.123.

³⁴*Ibid.*

³⁵http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,Office_of_Personnel_Management, Ralph M. Malone, diakses pada 20 November 2017.

³⁶Wawancara dengan Bapak Hendra, Marketing Bidang KUR, 30 Oktober 2017, bertempat di Kantor BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru

- 2) Legalitas Usaha yang meragukan, yaitu bersangkutan mengenai izin usaha calon nasabah. Jika legalitas usaha calon nasabah dirasa meragukan oleh petugas bank yang melakukan penilaian, maka pihak bank akan berhati-hati dalam memberi persetujuan.
 - 3) Kredit macet, yaitu berkaitan dengan rekam jejak calon nasabah. Apabila calon nasabah pernah bermasalah dengan kredit macet atau dengan perbankan, maka pihak bank tidak akan memberikan persetujuan.
 - 4) Tidak adanya jaminan tambahan, yaitu berkaitan dengan agunan tambahan yang diberikan oleh calon nasabah. Apabila calon nasabah tidak memiliki agunan tambahan dalam proses pemberian KUR Mikro ini, maka pihak bank akan mempertimbangkan untuk memberi persetujuan dan besar kemungkinan permohonan calon nasabah tersebut tidak akan dikabulkan.
- b) Kendala yang dihadapi Penerima KUR Mikro
- 1) Lamanya Proses persetujuan oleh Bank. Proses persetujuan yang dilakukan oleh pihak bank menjadi permasalahan bagi calon penerima KUR Mikro ini. Rizal seorang pedagang Nasi Ampera mengatakan bahwa “saya menunggu hasil persetujuan oleh pihak bank selama hampir 2 bulan, saya tidak mengetahui alasan mengapa hal itu dapat terjadi dan tidak ada penjelasan dari pihak bank”.³⁷
 - 2) Adanya percaloan, yaitu adanya praktek percaloan yang dilakukan oleh oknum bank yang meminta uang dengan iming-iming tidak akan mempersulit dan mempercepat permohonan yang dilakukan calon nasabah. Naldi seorang pedagang sepatu mengatakan bahwa “ketika saya mengajukan permohonan sebagai penerima KUR, ada orang bank (oknum) yang menawarkan kepada saya jalur samping yang mana prosesnya lebih mudah dan cepat, tetapi ia meminta

³⁷Wawancara dengan Bapak Rizal, pedagang Nasi Ampera, 2 November 2017, bertempat di Ampera Siang Malam, jalan Belimbing Nomor 39 Pekanbaru.

imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pinjaman yang saya ajukan”.³⁸

- 3) Adanya permintaan agunan tambahan, adanya permintaan agunan tambahan yang dilakukan oleh pihak Bank sangat memberatkan bagi para calon nasabah. Ikhsan seorang pedagang Sepatu mengatakan bahwa “saya pernah mengajukan permohonan KUR, saya telah melengkapi semua persyaratan kecuali agunan tambahan karena saya tidak punya, dan pada akhirnya permohonan saya ditolak sedangkan kedai disamping saya yang sama-sama mengajukan dan kondisi usaha kami sama tetapi ia menyerahkan agunan tambahan berupa BPKB Motor dan ternyata permohonannya diterima, saya sangat merasa berat dengan agunan tambahan tersebut yang tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah”.³⁹

B. Alasan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru Meminta Agunan Tambahan Kepada Calon Nasabah dalam Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

1. Pengertian Agunan

Istilah agunan dan jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak membedakan pengertian keduanya yaitu sama-sama berarti tanggungan. Pada dasarnya pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama, namun dalam dunia perbankan istilah jaminan dan agunan memiliki perbedaan dalam penggunaannya.

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari Tahun 1991, yaitu jaminan merupakan suatu keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴⁰

Pengertian agunan diatur dalam dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam

³⁸Wawancara dengan Bapak Naldi, pedagang Sepatu, 2 November 2017, bertempat di jalan Soekarno Hatta (seberang Rumah Sakit Eka Hospital) Pekanbaru.

³⁹Wawancara dengan Bapak Ikhsan, pedagang Sepatu, 2 November 2017, bertempat di jalan Soekarno Hatta (seberang Rumah Sakit Eka Hospital) Pekanbaru.

⁴⁰SK Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari Tahun 1991.

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁴¹

Agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.⁴² Sedangkan agunan tambahan adalah jaminan tambahan diluar obyek usaha yang dibiayai dan berupa surat-surat berharga seperti BPKB kendaraan bermotor, sertifikat rumah, dan surat berharga lainnya.⁴³

Jika kreditur benar-benar mengajukan penawaran (meminta) jaminan atas pinjaman debitur, uang itu akan dikembalikan ke kreditur hanya untuk memuaskan hutang.⁴⁴

2. Alasan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru Meminta Agunan Tambahan Kepada Calon Nasabah dalam Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa Perikatan.⁴⁵

Namun dalam prakteknya pihak penyalur dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru tetap mewajibkan kepada calon debitur yang mengajukan dirinya sebagai penerima program Kredit Usaha Rakyat

(KUR) Mikro untuk menyerahkan agunan tambahan kepada pihak bank jika ingin permohonan yang diajukannya dapat diproses oleh pihak bank.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hardi selaku Kepala Unit dan Bapak Iksan selaku Marketing Bidang KUR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru mengatakan bahwa alasan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku meminta agunan tambahan kepada calon debitur berupa BPKB kendaraan bermotor, surat tanah, maupun surat berharga lainnya adalah :⁴⁶

- a) Untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada pihak bank terhadap dana yang diberikannya kepada debitur;
- b) Untuk memastikan agar debitur memiliki niat dan itikad baik untuk memenuhi prestasinya dikarenakan surat berharga miliknya dijadikan sebagai agunan tambahan;
- c) Tidak adanya keberatan dari nasabah dalam menyerahkan agunan tambahan kepada pihak penyalur.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hardi tersebut yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak merasa keberatan mengenai agunan tambahan tersebut sangat berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para nasabah KUR Mikro. Mereka mengatakan sangat keberatan dan terbebani dengan adanya agunan tambahan yang diminta oleh pihak bank, dan mereka yang tidak memiliki agunan tambahan terpaksa harus gigit jari karena tidak bisa menikmati program KUR yang gembar-gembornya didengungkan pemerintah tanpa agunan dan ditujukan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki agunan tambahan untuk mengajukan pinjaman modal kerja atau modal usaha kepada perbankan.

Kebijakan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru yang meminta agunan tambahan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dirasa membebani para calon nasabah yang ingin mengajukan diri sebagai penerima. Ria seorang Pedagang Aksesoris mengaku sangat terbebani

⁴¹Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁴²Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

⁴³Wawancara dengan Bapak Hardi, Kepala Unit BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru, 3 November 2017, bertempat di Kantor BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru.

⁴⁴<http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,Small>
Business Loan Source, Inc, ST. Marry, diakses pada tanggal 20 November 2017.

⁴⁵Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Hardi sebagai Kepala Unit dan Bapak Iksan sebagai Marketing bidang KUR BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru, 3 November 2017, bertempat di Kantor BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru.

dengan dimintanya agunan tambahan oleh pihak penyalur, ia mengaku harus meminjam BPKB sepeda motor saudaranya ketika mengajukan diri sebagai penerima KUR dan hal tersebut dirasa sangat memberatkan dirinya.⁴⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bur yang juga seorang pedagang aksesoris ketika hendak mengajukan diri sebagai penerima KUR, ia bingung karena tidak memiliki surat berharga untuk dijadikan agunan tambahan seperti yang diminta oleh pihak bank, ia merasa tertipu karena pemerintah selalu mengkampanyekan bahwa KUR Mikro tanpa agunan namun dalam prakteknya agunan tambahan tersebut menjadi hal yang wajib dan mutlak jika ingin menjadi penerima program KUR.⁴⁸

Dimintanya agunan tambahan oleh pihak penyalur ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Hal ini dikarenakan oleh adanya pertentangan antara hukum atau aturan yang ada dengan praktek-praktek atau pelaksanaan dari aturan hukum tersebut, yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya dan calon nasabah penerima KUR pada khususnya karena tidak adanya sinkronisasi antara hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan, penulis menemukan bahwa benar adanya agunan tambahan yang diminta oleh pihak penyalur. Namun dalam hal ini pihak penyalur mengatakan bahwa tidak adanya rasa keberatan dari nasabah dalam hal ini, akan tetapi berdasarkan wawancara dengan nasabah ditemukan fakta bahwa kenyataannya justru terbalik karena nasabah sangat merasa keberatan akan hal itu.

Berdasarkan fakta tersebut ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan aturan perundang-undangan, yakni Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang menyebutkan bahwa agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa Perikatan. Hal ini menggambarkan bahwa kejadian ini telah menghilangkan apa yang disebut dengan kepastian hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan pemberian KUR Mikro pada PT. BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru dilakukan melalui beberapa tahap, yang pertama proses permohonan Kredit, yaitu calon debitur mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak penyalur KUR. Yang kedua proses analisis Kredit, yaitu pihak penyalur menganalisa permohonan yang diajukan calon debitur serta memeriksa kelengkapan persyaratan dan kelayakan calon debitur. Yang ketiga proses pemberian putusan Kredit, yaitu keputusan mengenai persetujuan terhadap permohonan yang diajukan calon debitur yang dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Dan yang terakhir proses pencairan Kredit atau akad Kredit, yaitu berupa persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, flat bayar, serta menyangkut pembayaran pencairan KUR tersebut.
2. Alasan PT. BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru meminta agunan tambahan kepada calon nasabah adalah, yang pertama untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada pihak bank terhadap dana yang diberikannya kepada debitur. Yang kedua untuk memastikan agar debitur memiliki niat dan itikad baik untuk memenuhi prestasinya dikarenakan surat berharga miliknya dijadikan sebagai agunan tambahan. Dan yang terakhir karena tidak adanya keberatan dari nasabah dalam menyerahkan agunan tambahan kepada pihak penyalur.

B. Saran

1. Lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar para calon nasabah dapat mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini lebih mudah, aman, nyaman, dan lebih cepat dalam setiap prosesnya.
2. Menghapus permintaan agunan tambahan oleh pihak penyalur kepada para calon nasabah agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa

⁴⁷Wawancara dengan Ria, Pedagang Aksesoris, 5 November 2017, bertempat di Pasar Sukaramai Pekanbaru.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Bur, Pedagang Aksesoris, 5 November 2017, bertempat di Pasar Sukaramai Pekanbaru.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanpa agunan sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan UR, Pekanbaru.
- Djumhana, Muhamad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ediwarman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sofmedia, Medan.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group.
- Harun, Badriyah, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 6, Kencana, Jakarta.
- Kalo, Syafruddin, 2007, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat suatu Sumbangan Pemikiran" Makalah Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan.
- Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Martono, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, EKONISIA, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Purnada Media Group, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, dan Rasjidi, Ira, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rowis, John, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Umar Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sinungun, Muchdarsyah, 1993, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Perss (UI Perss) Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remi Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjiptoadinugroho, R, 1994, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiloejo Wirjo Wijono, 2005, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Fitriani, Riska, 2013, "Praktik Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kota Pekanbaru", *Jurnal Dinamika & Problematika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Hualam, Taufiqul, dan Syaifuddin Anshari, 2009, "Perjanjian Mudharabah: Studi Pada

PT BNI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Republica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Meriza Elpha Darnia, 2013, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) di Pasar Tradisional Panam Pekanbaru”, *Jurnal Dinamika dan Problema Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

[http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,
Superpriority Debtor In Possession
Credit Agreement](http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,Superpriority Debtor In Possession Credit Agreement), James River Coal Company, diakses pada tanggal 20 November 2017.

[http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,
Office of Personnel Management](http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,Office of Personnel Management), Ralph M. Malone, diakses pada 20 November 2017.

[http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,
Small Business Loan Source, Inc](http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,Small Business Loan Source, Inc), ST. Marry, diakses pada tanggal 20 November 2017.

[http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,
United States Court of Appeals](http://1.next.westlaw.com/Dokument/,,,United States Court of Appeals), Gary W. Ogletree, diakses pada tanggal 20 November 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 23/69/KEP/DIR Tahun 1991, Tentang *Jaminan Pemberian Kredit*.

D. Internet

<http://hukum.kompasiana.com>, diakses tanggal 27 Maret 2017.

<http://teorimurnihanskelsen.blogspot.co.id/2015/05/teori-murni-tentang-hukum.html?m=1>, diakses tanggal 13 Juni 2017.

<http://pse.litbang.deptan.go.id>, diakses pada 26 Oktober 2017.

<http://repository.gunadarma.ac.id>, diakses pada 26 Oktober 2017.

<http://kredit-uasaha-rakyat.co.cc>, diakses pada 26 Oktober 2017 .<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba.htm>, diakses tanggal 14 juli 2017.

E. Wawancara

Wawancara langsung dengan Bapak Hardi Kepala Unit bank BRI Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru.

Wawancara langsung dengan Bapak Hardi Kepala Unit dan Bapak Ikhsan Marketing bidang KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tuanku Tambusai Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Rizal, pedagang Nasi Ampera, 2 November 2017, bertempat di Ampera Siang Malam, jalan Belimbing Nomor 39 Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Naldi, pedagang Sepatu, 2 November 2017, bertempat di jalan Soekarno Hatta (seberang Rumah Sakit Eka Hospital) Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Ikhsan, pedagang Sepatu, 2 November 2017, bertempat di jalan Soekarno Hatta (seberang Rumah Sakit Eka Hospital) Pekanbaru.

Wawancara dengan Ria, Pedagang Aksesoris, 5 November 2017, bertempat di Pasar Sukaramai Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Bur, Pedagang Aksesoris, 5 November 2017, bertempat di Pasar Sukaramai Pekanbaru.